

Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sinta Permata Sari¹, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: sintapermatasari135@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak

Penyediaan barang publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonominya. Barang publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan keamanan tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar karena sifat non-rival dan non-eksklusifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam penyediaan barang publik dapat mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan akses dan pemerataan barang publik, serta dalam mengintervensi kegagalan pasar. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, dan ketimpangan wilayah menjadi penghambat efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola publik, transparansi anggaran, dan desentralisasi kebijakan untuk optimalisasi pelayanan barang publik yang berkeadilan.

Kata kunci: *Pemerintah, Barang Publik, Kesejahteraan Sosial, Kegagalan Pasar, Kebijakan Publik*

Abstract

The provision of public goods is a core responsibility of the government in fulfilling its social and economic functions. Public goods such as education, health, basic infrastructure, and security cannot be efficiently provided by market mechanisms due to their non-rivalrous and non-excludable characteristics. This study aims to analyze how government involvement in public goods provision contributes to achieving social welfare. A descriptive qualitative method was employed, using literature review and secondary data analysis from official sources. The findings reveal that the government plays a critical role in ensuring access and equity of public goods and in addressing market failures. However, challenges such as budget constraints, bureaucratic inefficiencies, and regional disparities hinder policy effectiveness. The study recommends strengthening public governance, enhancing budget transparency, and decentralizing policies to optimize equitable public goods delivery.

Keywords : *Government, Public Goods, Social Welfare, Market Failure, Public Policy*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam sistem ekonomi modern, terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat secara efisien disediakan oleh mekanisme pasar. Salah satu bentuk intervensi negara yang paling penting adalah penyediaan barang publik. Barang publik didefinisikan sebagai barang yang bersifat non-rival (penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan bagi individu lain) dan non-eksklusif (tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari penggunaannya), seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, jalan raya, penerangan jalan umum, dan keamanan.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penyediaan barang publik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak, kesempatan yang merata, serta jaminan terhadap hak-hak sosial. Sayangnya, dalam kenyataannya, distribusi barang publik masih belum merata, baik dari segi kuantitas maupun

kualitas. Ketimpangan antardaerah, ketidakefisienan birokrasi, serta anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Kegagalan pasar (market failure) menjadi alasan fundamental mengapa pemerintah harus turun tangan dalam penyediaan barang publik. Jika diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta, barang-barang tersebut cenderung tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau hanya dapat diakses oleh golongan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia, tetapi juga sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin keadilan distribusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan barang publik berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi hambatan dan strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode studi pustaka dan analisis data sekunder. Sumber data berasal dari:

1. Laporan resmi pemerintah (BPS, Kemenkeu, Kemendagri)
2. Jurnal ilmiah terkait ekonomi publik dan kebijakan publik
3. Buku teks ekonomi publik
4. Undang-Undang dan peraturan pemerintah terkait pelayanan publik dan keuangan negara

Data dianalisis menggunakan pendekatan konten (content analysis), dengan fokus pada peran, mekanisme, tantangan, serta dampak kebijakan pemerintah dalam penyediaan barang publik terhadap kesejahteraan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memegang peranan krusial dalam penyediaan barang publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar secara efisien. Barang publik, yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif, misalnya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan layanan kesehatan, merupakan kebutuhan fundamental bagi kesejahteraan sosial. Karena pasar swasta kurang memiliki insentif untuk menyediakan barang-barang ini secara optimal akibat free-rider problem, maka intervensi pemerintah menjadi sangat penting untuk menjamin akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penyediaan barang publik, pemerintah menjalankan beberapa fungsi utama yang mendukung terciptanya kesejahteraan sosial:

1. Penyedia Langsung Barang Publik

Pemerintah membangun dan mengelola infrastruktur publik seperti sekolah negeri, rumah sakit umum, fasilitas air bersih, dan jalan raya yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Penyediaan ini sangat vital untuk membuka akses pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Regulator dan Pengawas

Selain menjadi penyedia, pemerintah juga berperan sebagai regulator untuk memastikan kualitas barang publik yang disediakan sesuai standar serta terdistribusi secara adil. Regulasi ini mencegah terjadinya diskriminasi dan memastikan fasilitas publik tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan saja, melainkan juga menjangkau daerah terpencil.

3. Fasilitator dan Pendukung Swasta

Dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan insentif dan subsidi kepada pihak swasta agar mau berkontribusi dalam penyediaan barang publik, contohnya program kemitraan dengan sekolah atau rumah sakit swasta, sehingga cakupan layanan publik dapat diperluas dengan sumber daya yang lebih beragam.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dan tantangan yang sering dihadapi pemerintah, di antaranya:

1. Keterbatasan Anggaran dan Ketimpangan Fiskal

Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini

menyebabkan ketidakmerataan kualitas dan kuantitas barang publik antar daerah, yang berujung pada disparitas kesejahteraan sosial.

2. Masalah Birokrasi dan Korupsi

Lambatnya proses birokrasi dan adanya praktik korupsi menyebabkan pemborosan anggaran serta keterlambatan dalam penyediaan barang publik. Misalnya, pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan yang tidak selesai tepat waktu atau kualitasnya tidak memenuhi standar.

3. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program membuat barang publik yang disediakan kurang sesuai dengan kebutuhan lokal dan berpotensi tidak berkelanjutan.

4. Keterbatasan Evaluasi dan Data

Pemerintah seringkali tidak memiliki data yang akurat dan sistem evaluasi yang memadai untuk mengukur efektivitas penyediaan barang publik, sehingga sulit melakukan perbaikan yang berbasis bukti.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah agar penyediaan barang publik dapat lebih optimal dan berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial:

1. Desentralisasi Fiskal yang Efektif

Memberikan kewenangan dan dana yang memadai kepada pemerintah daerah, namun juga dengan pengawasan ketat untuk mendorong pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

2. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan dan pelaporan anggaran (misalnya e-procurement dan e-budgeting) dapat mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan efisiensi.

3. Public-Private Partnership (PPP)

Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan barang publik dapat menjadi solusi bagi keterbatasan dana pemerintah sekaligus memanfaatkan keahlian dan sumber daya swasta.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan penyediaan barang publik memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Evaluasi Berbasis Data dan Indikator Kinerja

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data dan indikator kinerja akan membantu pemerintah mengidentifikasi keberhasilan maupun kelemahan dalam penyediaan barang publik sehingga dapat segera diperbaiki.

Secara khusus, penyediaan barang publik dalam sektor pendidikan dan kesehatan telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Program pendidikan gratis dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari barang publik telah membantu jutaan masyarakat memperoleh akses layanan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, kualitas layanan yang belum merata dan defisit pembiayaan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.

Secara keseluruhan, keberhasilan pemerintah dalam menyediakan barang publik sangat menentukan terciptanya kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan. Melalui penguatan tata kelola, penggunaan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat, penyediaan barang publik dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat.

Keterkaitan Konseptual dengan Kajian Terkini

Penyediaan barang publik oleh pemerintah merupakan bagian integral dari upaya menciptakan kesejahteraan sosial yang merata, terutama dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Keterkaitan antara peran strategis pemerintah ini dengan berbagai

kajian ilmiah kontemporer terlihat jelas dalam tiga studi yang relevan. Pertama, penelitian Riofita (2024) mengenai *Fintech Syariah* menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam memberikan regulasi dan kontrol risiko dalam mendukung sektor swasta, khususnya layanan keuangan digital berbasis syariah. Hal ini selaras dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan barang publik, terutama untuk segmen masyarakat rentan seperti pelaku UMKM Muslim, yang seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Kedua, studi Riofita (2022) tentang pemberdayaan jaringan digital dalam pemasaran perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi informasi dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas akses pendidikan sebagai barang publik. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mendorong desentralisasi fiskal dan kolaborasi lintas sektor guna memperluas jangkauan layanan pendidikan, terutama bagi generasi muda di era digital. Ketiga, temuan dalam artikel Riofita (2018) mengenai kualitas pelayanan publik di BP2T Provinsi Riau menekankan pentingnya aspek tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan kelengkapan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang prima. Hal ini memperkuat argumen bahwa tantangan birokrasi dan keterbatasan evaluasi merupakan hambatan nyata dalam optimalisasi barang publik, yang hanya dapat diatasi melalui reformasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, ketiga kajian tersebut memberikan landasan empiris dan konseptual bahwa keberhasilan penyediaan barang publik oleh pemerintah tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada sinergi regulasi, inovasi digital, dan keterlibatan berbagai pihak dalam tata kelola publik yang adaptif dan partisipatif.

SIMPULAN

Penyediaan barang publik merupakan instrumen vital dalam peran pemerintah untuk menjamin tercapainya kesejahteraan sosial secara merata. Barang-barang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar karena sifatnya yang non-rival dan non-eksklusif, sehingga intervensi negara menjadi keharusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran ganda sebagai penyedia langsung, regulator, serta fasilitator dalam mendorong kolaborasi dengan sektor swasta. Namun, efektivitas penyediaan barang publik di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, antara lain keterbatasan anggaran, ketimpangan fiskal antar daerah, birokrasi yang belum efisien, serta minimnya partisipasi dan evaluasi berbasis data.

Melalui strategi desentralisasi fiskal yang efektif, penguatan tata kelola publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah dapat mengoptimalkan pelayanan barang publik. Keterkaitan dengan berbagai studi sebelumnya memperkuat temuan ini, di mana kajian tentang *Fintech Syariah*, pemberdayaan jaringan digital dalam pendidikan tinggi, serta kualitas pelayanan publik, semuanya menegaskan bahwa sinergi antara regulasi, inovasi digital, dan tata kelola yang baik adalah kunci utama dalam menciptakan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam menyediakan barang publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun sistem yang partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025*. Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Sosial dan Ekonomi Indonesia*.
Ihsan Suciawan Nawir. (2021). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lesmana Rian Andhika. (2017). *Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat*. Universitas Padjadjaran.
Mansyur, dkk. (2018). *Kebijakan Pemerintah*. Program Studi Kebijakan Pemerintah, Vol 1 No 2.
Riofita, H (2018) *Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau*. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI, MANAJEMEN DAN KEUANGAN, 2(1),43
Riofita, H (2022) *Developing Digital Empowerment Programs to Enhance the Marketing Performance of Private Islamic Higher Education Institutions*. Muslim Business and Economic Review, 1(2), 258-263

Riofita,H (2024) *Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech*. Jurnal Ekonomi Indonesia, 13(2), 137